

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sangat berperan dalam pembangunan suatu bangsa. Banyak kajian menyatakan bahwa besarnya suatu bangsa karena pendidikannya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam definisi tersebut, pendidikan mengandung makna sebuah usaha sadar dan terencana. Pendidikan yang mengembangkan dan memfasilitasi perubahan yaitu pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional mengatakan bahwa:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI, 2003), h. 3.

Pendidikan merupakan hak setiap orang, setiap orang berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Telah tertuang di dalam salah satu pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional yaitu: Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi pengelolaan manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga diperlukan pembaharuan pendidikan secara berencana, terarah dan berkesinambungan.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa peranan pendidikan sangat dibutuhkan manusia sejak lahir hingga meninggal. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang cerdas dan mandiri sangat diperlukan peran pendidikan. Pemerintah memegang peranan sangat penting dalam pengembangan pendidikan karena pemerintah sebagai actor utama dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Sehingga sangat perlu adanya kerjasama antara *stakeholder* dengan Pemerintah.<sup>2</sup>

Adapun ayat yang menjelaskan tentang sarana dan prasarana pendidikan yaitu surah An-Nahl ayat 68.

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ  
(68)

---

<sup>2</sup>Cahyaningrum Prabawati, “Kecukupan Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Luar Biasa (Slb) Negeri 1 Bantul, *Skripsi*, UIN Yogyakarta, 2015, h. 1.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana sangat penting terutama dalam hal pendidikan yang menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung agar tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Hal itu dapat di lihat pada kalimat bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba Nya untuk membuat sarang lebah atau dapat diartikan juga dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pendidikan dan pengajaran. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas salah satunya dengan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.<sup>3</sup>

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tersebut sangat terlihat bahwa pengelolaan manajemen pendidikan yang efisien dan relevan dengan tuntutan perubahan kehidupan yang diperlukan pembaharuan pendidikan. Salah satu pengelolaan manajemen pendidikan yang perlu diperbaharui ialah pengelolaan manajemen dibidang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat mendukung dan memperlancar proses pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari proses pendidikan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pendidikan, maka keberadaan sarana dan prasarana pendidikan tidak dapat diabaikan, melainkan harus dipikirkan untuk meningkatkan kualitas dan

---

<sup>3</sup>Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 37.

kuantitas di suatu lembaga pendidikan. Apalagi di era teknologi ini, dimana setiap pendidikan dihadapkan pada kemampuan menghadirkan sarana dan prasarana yang *up to date* sesuai tuntutan zaman.

*According to Hayk Harutyunian and Areg Mickaelian, only a small fraction of school are accommodated with even the simplest modern facilities such as Internet and computers. School pupils use these facilities chiefly in Internet cafes, of which there are many in large cities, but very few in the villages.*<sup>4</sup>

Bidang sarana dan prasarana pendidikan berkenaan dengan fasilitas dan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pendidikan yang tersedia. Sarana dan prasarana pendidikan pengadaannya masih sangat tergantung dari Pemerintah pusat. Pemerintah memegang kendali besar dalam pengadaan sarana dan prasarana karena seluruh dana dipegang dan diatur oleh Pemerintah.<sup>5</sup>

Menurut Barnawi dan M. Arifin, sarana pendidikan mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung menunjang proses pendidikan sedangkan prasarana pendidikan mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. Sarana dan prasarana sangat perlu dalam menunjang keterampilan siswa agar siap bersaing terhadap pesatnya teknologi. Sarana dan prasarana merupakan bagian penting yang perlu dipersiapkan secara cermat dan berkesinambungan sehingga dapat dijamin selalu terjadi proses belajar mengajar yang lancar. Dalam penyelenggaraan pendidikan sarana prasarana

---

<sup>4</sup>Hayk Harutyunian dan Areg Micjaelian, "Modern Facilities in Astronomy Education" *Jurnal Internasional Astronomical Union Armenia*, 2007, h. 263.

<sup>5</sup>Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016) h. 181

sangat dibutuhkan untuk menghasilkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.

Melengkapi sarana prasarana merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sarana prasarana yang lengkap dapat menunjang efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Kelengkapan sarana prasarana ini harus disesuaikan juga dengan standar sarana prasarana yang ditetapkan oleh Pemerintah. Standar sarana dan prasarana diartikan sebagai standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan demikian setiap sekolah minimal harus memiliki sarana dan prasarana yang disebutkan tersebut untuk menunjang proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak. Apabila sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah minim, maka akan berpengaruh terhadap semangat belajar siswa. Selanjutnya dalam peraturan tersebut pada pasal 42 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor pendidikan yang keberadaanya sangat mutlak dalam proses pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang

terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya itu sendiri. Pembahasan mengenai sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan itu sendiri selalu bersamaan dengan upaya perbaikan mutu pendidikannya.

Oleh karena itu, dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 ayat 1 dijelaskan bahwa: “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik”.<sup>6</sup>

Dengan demikian adanya manajemen sarana dan prasarana yang baik dapat menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi peserta didik maupun pendidikan yang berada di sekolah. Karena dengan adanya manajemen sarana dan prasarana akan membuat sarana dan prasarana lebih terjaga dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi secara optimal dalam proses pendidikan.<sup>7</sup>

Menurut E. Mulyasa, “begitu pentingnya sarana dan prasarana pendidikan sehingga setiap institusi berlomba-lomba untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan demi meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Tidak itu saja, kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu daya tarik bagi calon peserta didik”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI, 2003), h. 14.

<sup>7</sup>E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 50.

<sup>8</sup>Barnawi & M. Arifin, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2012), h. 7.

Sarana dan prasarana sekolah harus memenuhi standar minimum dalam hal ini dapat dilihat dari PERMENDIKNAS No. 24 Tahun 2007 pasal 1 mencakup kriteria minimum prasarana. Penilaian untuk akreditasi sekolah berkenaan dengan sarana dan prasarana harus memenuhi standar sarana dan prasarana minimum.

Sarana dan prasarana pendidikan yang tidak di kelola dengan pengetahuan yang cukup sehingga sering terjadi ketidaktepatan dalam pengelolaan. Ketidaktepatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menyangkut cara pengadaan, penanggungjawab dan pengelola, pemeliharaan dan perawatan, serta penghapusan. Bahkan banyak pengelola yang kurang memahami standar dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Beberapa kasus membuktikan banyak sarana yang di beli, padahal bukan menjadi skala prioritas utama suatu lembaga pendidikan.

Hal ini paling tragis dan sering terjadi dalam budaya kita adalah mampu membeli tetapi tidak mampu merawat. Jika pendidikan ingin maju, hendaklah pandai-pandai menjaga dan memelihara barang-barang atau sarana dan prasarana tetap tahan lama dan itu dapat menghemat biaya. Yang awalnya untuk biaya perbaikan maka dapat digunakan untuk kepentingan lain.

Upaya peningkatan mutu pendidikan secara Nasional merupakan salah satu program yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah yang diarahkan agar lembaga pendidikan selalu berupaya untuk melakukan jaminan mutu layanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud jaminan adalah proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan yang seharusnya terjadi dan sesuai pula yang diterapkannya. Apabila setiap satuan pendidikan selalu

berupaya untuk memberikan jaminan mutu dan upaya secara terus menerus dilakukan maka diharapkan mutu pendidikan secara Nasional akan terus meningkat. Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya penilaian terhadap lembaga pendidikan tersebut.<sup>9</sup>

Penilaian lembaga pendidikan biasanya dilakukan melalui proses yang dinamakan akreditasi. Pada umumnya akreditasi adalah penilaian Pemerintah terhadap suatu lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan nasional, yang biasanya predikat akreditasi itu ditandai dengan nilai A, B dan C dengan maksud agar sekolah yang satu dengan yang lain bias berkompetisi untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan nasional. Adapun yang dimaksud dengan peringkat disini adalah kedudukan suatu sekolah terhadap sekolah lain, dan kedudukan sekolah terhadap standar yang telah ditentukan oleh Pemerintah sebagai ukuran kualifikasi yang diharapkan untuk mencapai sekolah-sekolah yang bersangkutan. Jadi, dapat dikatakan bahwa akreditasi adalah penilaian jenjang kualitas lembaga pendidikan yang telah diakreditasi oleh Pemerintah.

Kepala sekolah yang menduduki jabatan dalam mengambil kebijakan seharusnya mampu meningkatkan berbagai komponen yang dapat membangun kinerja data dan mutu dari tenaga pendidik dan kependidikan. Proses penjaminan mutu lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi bidang-bidang pencapaian dan prioritas untuk perbaikan, menyediakan data untuk pembuatan keputusan bersama

---

<sup>9</sup>Muhammad Fathurrohman dan Sulistyiorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam; Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik (Praktek dan Teoritik)*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 211.

dan membantu membangun budaya perbaikan yang berkelanjutan sesuai tujuan akreditasi sekolah.

Peran dan kemampuan kepala sekolah yang dapat memberikan pelayanan baik dalam penataan sarana dan prasarana maupun pemberdayaan warga sekolah. Usaha peningkatan akreditasi sekolah mengharuskan kepala sekolah memiliki acuan atau rencana strategi sekolah, sehingga lembaga pendidikan dapat melayani kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Pendidikan yang bermutu menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi salah satu pranata kehidupan sosial yang kuat dan berwibawa, serta memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan peradaban bangsa, budaya dan agama.

Pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan secara langsung akan membawa sekolah/madrasah melakukan pembenahan pada berbagai aspek. Seorang kepala sekolah harus memiliki pandangan luas tentang sekolahnya dan apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Upaya pemenuhan standar nasional pendidikan melalui evaluasi diri akan menuntut kepala sekolah/madrasah dan guru untuk menumbuh kembangkan sikap kepedulian, semangat bekerja, disiplin, dan hubungan yang harmonis diantara sesama warga sekolah/madrasah.

Guru adalah penanggung jawab peserta didik di kelas. Oleh karenanya, guru perlu siap dengan segala kewajiban, baik dari segi manajemen proses pembelajaran maupun isi materi pembelajaran. Guru juga harus bertanggungjawab mulai dari jadwal pembelajaran, pembagian tugas peserta didik, kebersihan dan ketertiban kelas, pengaturan tempat duduk peserta didik dan penempatan media pembelajaran pada

tempatnyapelaksanaan peningkatan mutu sekolah/madrasah melalui evaluasi diri sekolah/madrasah melalui tahapan-tahapan pelaksanaan.

Dalam akreditasi terdapat 8 komponen yang harus di penuhi sekolah jika ingin mendapatkan hasil akreditasi yang baik. Delapan komponen akreditasi sekolah itu ialah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Namun fakta dilapangan masalah yang sering dihadapi sekolah/madrasah ialah sulitnya meningkatkan nilai akreditasi karena masih banyak standar dari sarana dan prasarana itu belum terpenuhi sepenuhnya dan dilihat dari segi pengelolaan yang masih kurang juga merupakan salah satu faktor yang membuat sulitnya meningkatkan akreditasi tersebut. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan pengaplikasian manajemen sarana dan prasarana.

MTs Negeri 1 Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu madrasah tsanawiyah yang banyak diminati masyarakat. Kalau dilihat dari delapan komponen yang harus dipenuhi madrasah, madrasah ini sudah memenuhi dan bagus dibandingkan madrasah lain. Namun dilihat dari data hasil nilai akreditasi untuk madrasah ini yang mana nilai standar sarana dan prasarana disana masih kurang dibandingkan dengan nilai standar yang lain. Setelah peneliti melakukan penjajakan awal ternyata memang benar bahwa untuk standar sarana dan prasarana belum sesuai dengan standar nasional pendidikan karena masih ada kapasitas isi kelas yang tidak sesuai dengan ukuran luas kelasnya. Dengan tidak sesuainya dengan standar sarana dan prasarana ini membuat nilai madrasah ini sedikit menurun dibandingkan dengan

nilai standar yang lain. Melihat dari kenyataan itu, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh tentang **“Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan Akreditasi di MTs Negeri 1 Hulu Sungai Selatan”**.

## **B. Definisi Operasional**

Penulis memberikan pemahaman tentang judul penelitian ini ini, sehingga diperlukannya penegasan terhadap istilah-istilah yang ada. Adapun istilah yang dimaksud antara lain:

### **1. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti: gedung, ruang belajar/kelas, alat-alat/media pendidikan, meja, kursi dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun/taman sekolah, jalan menuju ke sekolah dan kantin sekolah yang dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar maka akan menjadi penunjang proses pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses pengelolaan seluruh perangkat, alat, bahan dan fasilitas lainnya yang digunakan dalam sebuah proses kegiatan belajar mengajar agar proses belajar mengajar bisa berjalan secara efektif dan efisien.

### **2. Akreditasi Sekolah**

Akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria (standar) yang ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah bersama Pemerintah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat yang diberikan kepada sekolah yang bersangkutan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dari hal di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan menggali tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan akreditasi di MTs Negeri 1 Hulu Sungai Selatan yang diantaranya ialah perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan beberapa pokok masalah untuk memberikan batasan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan akreditasi di MTs Negeri 1 Hulu Sungai Selatan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan akreditasi di MTs Negeri 1 Hulu Sungai Selatan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan akreditasi di MTs Negeri 1 Hulu Sungai Selatan.
2. Mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan akreditasi di MTs Negeri 1 Hulu Sungai Selatan.

#### **E. Alasan Memilih Judul**

1. Pembahasan yang penulis angkat masih jarang dibahas di UIN Antasari Banjarmasin terutama di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Manajemen Pendidikan Islam.
2. Sekolah yang penulis teliti yaitu di MTs Negeri 1 Hulu Sungai Selatan sesuai dengan latar belakang masalah yang dijabarkan penulis.
3. Sarana dan prasarana merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan.
4. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan akreditasi.

#### **F. Signifikansi Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi pengetahuan serta pengalaman baru dalam pelaksanaan dan penerapan ilmu pengetahuan. Selain itu juga dapat menjadi bahan pertimbangan sumber informasi bagi peneliti lain mengenai

permasalahan tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan akreditasi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Madrasah, berguna sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk yang akan datang.
- b. Bagi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, diharapkan penelitian ini menjadi bahan tambahan pengetahuan atau referensi untuk penelitian yang akan datang terutama mengenai manajemen sarana dan prasarana di sekolah. Bagi peneliti berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman secara langsung terutama tentang masalah manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan akreditasi.
- c. Serta dapat di jadikan rujukan yang konkrit ketika peneliti turun langsung di dunia pendidikan.

## G. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Riska dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul *Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan Hasil Belajar di Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif maka didapatkan kesimpulan dari hasil penelitian dengan 3 madrasah yaitu MTs Al-

Irsyad kelas VIII-A mempunyai sarana dan prasarana yang tidak lengkap tetapi mempunyai hasil belajar yang cukup baik. Sedangkan MTs Izharussalam kelas VIII-A mempunyai sarana dan prasarana yang tidak lengkap tetapi mempunyai hasil belajar yang cukup baik. Dan MTsN Habirau Negara VIII-2 mempunyai sarana dan prasarana kurang lengkap tetapi mempunyai hasil belajar yang cukup baik. Dengan demikian, Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Daha Selatan mempunyai sarana dan prasarana yang meliputi: ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium IPA tidak memenuhi standar kelengkapan dan hasil belajar siswa kelas VIII dapat dikategorikan cukup baik.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan untuk menjadikan pertimbangan bagi peneliti dalam menentukan fokus penelitian. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang kelengkapan sarana dan prasarana dengan hasil belajar sedangkan penelitian saya membahas manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan akreditasi.

2. Penelitian oleh Dian Amaliyani dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Penelitian ini berjudul *Pengaruh Manajemen Sarana dan Prasarana terhadap Pencapaian Akreditasi A di Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil kesimpulan

---

<sup>10</sup>Riska, "Kelengkapan Sarana dan Prasarana dengan Hasil Belajar di Madrasah Tsanawiyah se-Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan", *Skripsi*, UIN Antasari Banjarmasin, 2014, h. 80.

penelitian bahwa terdapat pengaruh manajemen sarana dan prasarana terhadap pencapaian akreditasi A di Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan untuk menjadikan pertimbangan bagi peneliti dalam menentukan fokus penelitian. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang pengaruh manajemen sarana dan prasarana terhadap pencapaian akreditasi A, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan akreditasi.

3. Penelitian dari Wardi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul *Manajemen Sarana dan Prasarana di Madrasah Tsanawiyah Al-Irsyad Desa Muning Baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen sarana dan prasarana di MTs Al-Irsyad Desa Muning Baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilaksanakan dengan berbagai cara atau usaha yang meliputi perencanaan sarana dan prasarana, pengadaan sarana dan prasarana, pendistribusian, penggunaan dan pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan. Faktor yang mendukung dan menghambat di dalam manajemen sarana dan prasarana meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian ini dengan

---

<sup>11</sup>Dian Amaliyani, "Pengaruh Manajemen Sarana dan Prasarana terhadap Pencapaian Akreditasi A di Madrasah Aliyah Negeri 1 Makassar", *Skripsi*, UIN Alauddin Makassar, 2017, h. 80.

<sup>12</sup>Wardi, *Manajemen Sarana dan Prasarana di Madrasah Tsanawiyah Al-Irsyad Desa Muning Baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan*, *Skripsi*, UIN Antasari Banjarmasin, 2018, h. 57.

penelitian peneliti ialah penelitian ini hanya berfokus pada manajemen sarana dan prasarananya, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan akreditasi.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika laporan penelitian ini terdiri dari lima bab yang secara umum diuraikan sebagai berikut.

Bab I tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.

Bab II berisi landasan teori tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan akreditasi di MTs Negeri 1 Hulu Sungai Selatan.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian yang terdiri dari penyajian dan analisis data. Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian tentang manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan akreditasi di MTs Negeri 1 Hulu Sungai Selatan.

Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saran-saran yang disampaikan peneliti atas hasil penelitiannya.